

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, baik entitas yang bergerak di bidang industri maupun nonindustri menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk memperoleh keuntungan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mampu merencanakan, mengatur, mengendalikan, serta mengorganisasi berbagai jenis sumber daya yang dimiliki, seperti, sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan hasil yang menguntungkan.

Menurut hasil penelitian Pasang, Pasulu, dan Lenas (2024), dari perspektif ekonomi, kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan umumnya berorientasi pada pencapaian laba (*profit oriented*). Keuntungan inilah yang menjadi salah satu indikator utama agar perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. Hal ini juga berlaku bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meskipun berada di bawah naungan pemerintah, BUMD tetap dituntut untuk dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah suatu entitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, berbentuk badan hukum, dan dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi mewakili pemerintah provinsi,

kabupaten, atau kota. Terdapat beberapa jenis BUMD, antara lain PERUMDA BPR, PERUMDA Pasar, dan PERUMDAM.

Tabel 1. 1 Daftar Piutang

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pendapatan Piutang	Piutang Tak Tertagih	%
1	PERUMDA BPR Gresik	Rp27.323.804.609	Rp600.313.151	2,20%
2	PERUMDA pasar Probolinggo	Rp1.600.000.000	Rp118.000.000	7,38%
3	PERUMDAM Madiun	Rp39.801.723.785	Rp4.264.974.810	10,72%

Berdasarkan data perbandingan piutang tak tertagih dari tiga perusahaan daerah, terlihat bahwa PERUMDAM Madiun memiliki tingkat piutang tak tertagih tertinggi. Jumlah piutang tak tertagih di PERUMDAM Madiun mencapai Rp4.264.974.810. Secara persentase terhadap pendapatan piutang, angka ini mencapai 10,72%, lebih tinggi dibandingkan PERUMDA Pasar Probolinggo 7,38% dan PERUMDA BPR Gresik 2,20%. Tingginya nominal dan persentase piutang tak tertagih pada PERUMDAM Madiun mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengendalian piutang, khususnya terkait tunggakan pembayaran rekening air pelanggan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM) dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum memenuhi kebutuhan masyarakat di kabupaten Madiun. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun tidak hanya memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga, tetapi juga melayani sektor sosial, industri, dan komersial. Perusahaan ini melakukan penjualan air bersih yaitu secara kredit bertujuan untuk mempermudah masyarakat

khususnya yang berada di daerah untuk menggunakan air bersih. Melalui penjualan secara kredit, pelanggan dapat memanfaatkan air bersih terlebih dahulu pada bulan berjalan dan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Namun terdapat beberapa faktor yang menghambat perusahaan dengan dilakukannya penjualan secara kredit salah satunya adalah tunggakan pembayaran rekening air oleh pelanggan. Hal itu menyebabkan jumlah piutang meningkat.

Menurut Elvina dan Rahmat (2022:1), Piutang merupakan aset penting bagi perusahaan, terutama yang menjalankan penjualan secara kredit. Namun, peningkatan jumlah piutang juga dapat menimbulkan risiko piutang yang tidak tertagih. Oleh karena itu manajemen harus mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin timbul akibat investasi dalam piutang serta biaya yang dikeluarkan untuk proses penagihan sebelum memutuskan untuk melakukan penjualan kredit. Pengelolaan piutang yang efektif dan efisien menjadi hal yang penting karena perputaran piutang berpengaruh langsung terhadap kelancaran operasional dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pengendalian piutang tak tertagih akan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjalankan penjualan secara kredit. Apabila pengendalian terhadap piutang tak tertagih diabaikan, perusahaan dapat mengalami penurunan keuntungan yang signifikan, yang berdampak pada terganggunya aktivitas operasional.

Setiap perusahaan tentu memerlukan arus kas yang stabil dan lancar guna mendukung kelangsungan operasional sehari-hari, serta untuk

memenuhi berbagai kewajiban keuangan, termasuk pembayaran kepada pemasok, biaya perawatan, dan gaji karyawan. Namun, ketika pelanggan menunda atau bahkan tidak melakukan pembayaran rekening air, hal ini dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Salah satu dampak nyata yang ditimbulkan adalah meningkatnya jumlah piutang tak tertagih, yaitu tagihan yang tidak berhasil dikumpulkan meskipun telah jatuh tempo. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aliran kas, tetapi juga berpotensi menurunkan efisiensi operasional dan menambah beban kerja pada bagian penagihan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, yang dilakukan oleh Damayanti dan Harahap (2022), penagihan piutang PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan masih belum optimal dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini terlihat dari perputaran piutang pada tahun 2020 yang hanya mencapai 3,58 kali, menjadi titik terendah dalam empat tahun terakhir, yang menunjukkan lambatnya proses perputaran dana dari piutang menjadi kas. Rata-rata piutang memperlihatkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021, yaitu dari Rp 619.772.307,00 pada 2018 menjadi Rp 760.812.823,00 pada 2019, lalu meningkat lagi menjadi Rp 1.058.329.046,00 pada 2020, dan mencapai Rp 1.286.939.287,00 pada 2021. Kenaikan yang konsisten setiap tahun ini mengindikasikan bahwa jumlah piutang yang belum tertagih semakin besar dan dapat menekan likuiditas perusahaan. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh rata-rata umur piutang pada tahun 2020 yang mencapai 100,56 hari, jauh melebihi standar waktu yang diharapkan,

sehingga berpotensi menghambat kelancaran arus kas, menurunkan kemampuan operasional, dan meningkatkan risiko piutang tak tertagih di masa mendatang.

Selain itu, hasil penelitian dari Nurhayati, Pohan, dan Nursisin (2023), Penagihan piutang oleh PDAM Tirtanadi Cabang Berastagi menunjukkan bahwa penagihan piutang mengalami ketidakefektifan yang signifikan, tercermin dari fluktuasi rasio perputaran piutang dan tingginya rasio tunggakan selama periode 2018 hingga 2021. Tingkat perputaran piutang di tahun 2018 mengalami penurunan signifikan sejak empat tahun yakni sebesar 3,58 kali, dan mengalami fluktuasi hingga mencapai 5,32 kali pada tahun 2020, sebelum turun lagi menjadi 3,90 kali di tahun 2021. Selain itu, rata rata umur piutang juga menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil, dengan peningkatan signifikan dari tahun 2018 ke 2019 dan 2019 ke 2020, namun penurunan tajam pada tahun 2021. Rata-rata umur piutang yang mencapai 101 hari pada tahun 2018 menunjukkan bahwa periode yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas di perusahaan masih belum efektif. Rasio tunggakan yang tinggi selama empat tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu menangani pengumpulan piutang di perusahaan dengan baik. Meskipun PDAM Tirtanadi Cabang Berastagi telah melaksanakan pemisahan fungsi dan pemberian otorisasi kepada staf, kepala bagian keuangan masih memiliki tugas ganda sebagai pengendali intern, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian piutang di dalam entitas.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pasang, Pasulu dan Lenas (2024), menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelanggan meningkat sebesar 0,88%, tunggakan hanya meningkat sebesar 0,08% yang menunjukkan efektivitas pengendalian internal dalam mengurangi tunggakan. Faktor ekonomi pelanggan dengan taraf hidup menengah ke bawah dan kesulitan dalam penagihan menjadi tantangan dalam pengurangan tunggakan. Namun, dengan penerapan pengendalian internal yang baik, diharapkan tunggakan dapat ditekan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan.

Berdasarkan tinjauan dari berbagai penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat PERUMDAM yang belum beroperasi secara efektif serta menghadapi permasalahan dalam pengendalian piutang yang kurang baik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul:

“Analisis Pengendalian Piutang Tak Tertagih Terhadap Tunggakan Pembayaran Rekening Air Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan, dengan itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengendalian piutang tak tertagih pada tunggakan pembayaran rekening air pelanggan di PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun?

2. Bagaimana efektivitas pengendalian piutang tak tertagih dalam mengurangi tunggakan pembayaran rekening air pelanggan di PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas adapun maksud dari penelitian ini Adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pengendalian piutang tak tertagih pada tunggakan pembayaran rekening air pelanggan di PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.
2. Untuk menganalisis efektivitas pengendalian piutang tak tertagih dalam mengurangi tunggakan pembayaran rekening air pelanggan di PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan mengenai pengelolaan piutang tak tertagih atas tunggakan pembayaran rekening air pelanggan.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi PERUMDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dalam mengevaluasi dan meningkatkan pengendalian piutang tak tertagih atas tunggakan pembayaran rekening air pelanggan.

b) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi.